



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Maret 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH DAERAH D.I. YOGYAKARTA
UNIT KERJA : BIRO TATA PEMERINTAHAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SUGENG PURWANTO**
2. Jabatan : **KEPALA BIRO**
3. NHK : **186261**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 1.675.000.000**

1. Tanah Seluas 150 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI
Rp. 150.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 250 m2/80 m2 di KAB / KOTA
SLEMAN, WARISAN Rp. 650.000.000
3. Tanah Seluas 370 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI
Rp. 740.000.000
4. Tanah Seluas 700 m2 di KAB / KOTA PURWOREJO, HASIL
SENDIRI Rp. 60.000.000
5. Tanah Seluas 600 m2 di KAB / KOTA PURWOREJO, HASIL
SENDIRI Rp. 75.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 182.500.000**

1. MOBIL, HONDA ACCORD SEDAN Tahun 1990, HASIL SENDIRI
Rp. 25.000.000
2. MOBIL, NISSAN SERENA HIGHWAY STAR Tahun 2007, HASIL
SENDIRI Rp. 110.000.000
3. MOTOR, HONDA VARIO 125 MATIC Tahun 2015, HASIL SENDIRI
Rp. 10.000.000
4. MOTOR, HONDA VARIO 150 X1H02N35M1 A/T Tahun 2020,
HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000
5. MOTOR, HONDA SUPRA 125 AFX12U21C08 M/T Tahun 2020,
HASIL SENDIRI Rp. 17.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 62.500.000**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	11.800.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.931.800.000
III. HUTANG	Rp.	100.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.831.800.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.